



# IMAMAH:

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Volume 3, Nomor 2, 2025 | E-ISSN: 3026-572X

<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/imamah>

## Analisis Kebijakan Pendidikan: *Systematic Literature Riview*

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Usiono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Indonesia

Email: [sriwahyuni12022004@gmail.com](mailto:sriwahyuni12022004@gmail.com)

### ABSTRAK

Untuk dengan pendidikan yang memiliki kualitas bermutu, maka pada pendidikan sendiri perlu adanya penyusunan kebijakan agar menjadi susunan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. kebijakan adalah instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu dalam kebijakan memerlukan analisis kebijakan yang berupa memahami dan meneliti tujuan kebijakan pendidikan yang sedang dipertimbangkan, Menetapkan arah dari implementasi kebijakan, yang agar tindakan pemerintah mencapai tujuan kebijakan berdampak bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap kebijakan pendidikan yang terjadi. Adapun metode penelitian yaitu dengan *Systematic Literature Riview (SLR)* dalam mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis semua bukti relevan mengenai topik pada penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang objektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil dan temuannya bahwa dalam analisis Kebijakan pendidikan ditemukan antara teori dengan realita yang terjadi di lapangan seperti bercampurnya politik dalam kebijakan maupun kurangnya penyusunan kebijakan pendidikan yang matang. Kesimpulannya bahwa analisis kebijakan pendidikan sangat diperlukan, dan bermanfaat dalam mengetahui, memahami dan mencari serta menciptakan sebuah kebijakan dalam pendidikan agar berdampak bagi kemajuan masyarakat meskipun terkadang diiringi permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci : Kebijakan, Teori, Tantangan

### ABSTRACT

*To achieve quality education, education itself requires the development of policies that can be implemented by educational institutions. Policy is an instrument for achieving a goal. Therefore, policy analysis requires understanding and examining the objectives of the education policy under consideration, determining the direction of policy implementation, and ensuring that government actions achieve these objectives and impact societal progress. Therefore, the purpose of this study is to analyze current education policies. The research method used is a *Systematic Literature Review (SLR)* to identify, assess, and synthesize all relevant evidence on the research topic to produce objective conclusions. Based on the research conducted, the results and findings indicate that in education policy analysis, there are gaps between theory and reality, such as the intermingling of politics in policy and the lack of mature education policy development. In conclusion, education policy analysis is essential and beneficial in identifying, understanding, and developing education policies that can impact societal progress, despite the challenges that sometimes arise.*

*Keywords: Policy, Theory, Challenges*

## PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan rangkaian dari suatu konsep, rencana, prinsip yang menjadi landasan maupun pedoman dalam tindakan agar tercapainya sebuah tujuan. Sebuah kebijakan berfungsi sebagai pemandu dalam pengambilan keputusan, membentuk tindakan dan diterapkan agar dapat memecahkan suatu persoalan. Untuk itu dalam sebuah kebijakan harus disusun, dipikirkan sebaik mungkin dengan melalui proses yang sistematis agar kebijakan dapat dirancang baik, efektif dan berdampak baik bagi masyarakat di masa sekarang maupun akan datang. (Prastiko & Suprianto, n.d.) Dari sebuah kebijakan, yang harus dilakukan adalah melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Tahapan ini memastikan kebijakan dirancang dengan baik, dilaksanakan secara efektif, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. (Shelvia Permata Sari et al., 2023)

Kebijakan Pendidikan seperti di Indonesia merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, serta memenuhi aspek legal-formal dan memiliki konsep operasional yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu di pendidikan sendiri diperlukannya analisis kebijakan pendidikan yang dilakukan. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk mengetahui, menghasilkan maupun tentang masalah yang timbul akibat dari sebuah kebijakan dalam pendidikan maupun pengambil keputusan dalam hal pendidikan (Elwijaya et al., 2021) Lebih lanjut, bahwa analisis kebijakan pendidikan bertujuan menganalisis, mempertahankan aspek dalam perancangan dan pembuatan kebijakan, mengumpulkan data terkait, mengidentifikasi masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah hingga pada penyampaian pada keputusan dalam pendidikan. Dalam menganalisis kebijakan artinya mengkritisi dan mengkaji agar di peroleh nya data informasi untuk dampaknya bagi masyarakat maupun negara guna terwujudnya kesejahteraan. Kemudian, kebijakan dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu bentuk keputusan yang menekankan pada penerapan dan tindakan terlepas dari sebuah kebijakan itu dilaksanakan atau tidak

Dalam kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal, dan memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan (Rozak et al., n.d.)

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, dalam realitanya dalam kebijakan pendidikan banyak ditemukan analisis kebijakan pendidikan yang didalamnya terdapat politik sebagai bentuk kepentingan. Banyak kasus terjadi dalam membuat kebijakan dengan tidak sejalan, mendominasi bahkan ada yang memberikan keterangan yang tujuannya berbeda bagi para analisis kebijakan. Jadi maksud tersebut mampu didapatkan dalam kurun waktu dekat dan maksud tujuan yang didapatkan untuk generasi kedepan. Kemudian, Analisis kebijakan di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal. Kebijakan yang diambil banyak yang bersifat politis dan terburu-buru. ng diambil di indonesia banyak tidak dianalisa secara menyeluruh. Akibatnya banyak kebijakan non-agresif dan pemecahan masalah yang didapatkan. Proses kebijakan tidak bisa disangkal jika mahal karena banyak kebijakan yang tidak dilaksanakan secara optimal. (Anesti & Wardani, n.d.) Seharusnya, Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat pro aktif dan problem

solving sehingga permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dapat diatasi. Berbicara sistem pendidikan bukanlah hal yang mudah, Sistem pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu diperlukannya pemahaman mengenai kebijakan pendidikan agar penyelenggara pendidikan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia (Konsep dasar kebijakan pendidikan Fadiah Elwijaya)

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memakai metode penulisan *Systematic Literature Review (SLR)*. *Systematic Literature Review* digunakan dalam mendalami cara penulisan dalam artikel tertentu dalam menghimpun data, menganalisis data, mengkaji hasil penelitian yang sudah ada dan untuk menjawab kebenaran dari pada suatu topik. Untuk melakukan penelitian ini peneliti menggunakan google scholar menjadi sumber bacaan dalam menyelesaikan topik penelitian yakni dengan menghimpun data-data sebagai bukti penelitian, dan dapat sebagai rujukan dalam menuliskan artikel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Yuwono mengatakan bahwa terdapat lima alasan mengapa analisis kebijakan penting sebagai berikut: (Oktavia et al., 2021)

1. Analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik karena itu kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan.
2. Analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara.
3. Analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif.
4. analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis, oleh karena itu bisa dipakai pada masa mendatang.
5. Analisis kebijakan mampu membagikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik). Oleh sebab itu analisis kebijakan publik mampu dijadikan objek yang dipakai untuk mewujudkan impian.

Berikut ini adalah Temuan pada jurnal berikut ini:

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
(Administrasi Pendidikan et al., n.d.)	Implementasi Kebijakan Pendidikan	Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial, serta perilaku lembaga administratif sebagai pelaksana program. Selain itu, efektivitas implementasi juga ditentukan oleh komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang baik.
(Teoretis & Aplikatif, 2018)	Analisis Kebijakan Pendidikan	kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berbasis pada analisis ilmiah yang komprehensif, sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial,

		sehingga implementasinya tidak konsisten di lapangan. Penelitian penulis juga menegaskan pentingnya pendekatan rasional, sistematis, dan multidisipliner dalam setiap tahap kebijakan — mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi — agar kebijakan pendidikan benar-benar berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
(Yuliah Pengawas Sekolah di Kementerian Agama et al., n.d.)	Kebijakan pendidikan dalam kebijakan publik	kebijakan pendidikan berperan sebagai langkah dasar untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik, mencakup pengembangan model pembelajaran, penerapan kurikulum, dan pembentukan karakter peserta didik 6903-Article Text-22960-1-10-20

Analisis kebijakan merupakan cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Namun, beberapa kebijakan pendidikan di Indonesia masih dianggap belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, sistem zonasi yang digunakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat menimbulkan efek negatif seperti kesempatan yang tidak merata dan menurunnya kompetensi akademik siswa karena nilai umur ditentukan oleh jarak rumah bukan dengan kemampuan akademik peserta didik (Administrasi Pendidikan et al., n.d.)

Selain itu, Ujian Nasional (UN) yang diadakan di Indonesia juga dikritik karena tidak menilai siswa secara menyeluruh dan menjadi beban bagi guru dan. Perubahan menteri dapat mengganti kebijakan pendidikan yang telah mapan, dan kebijakan pendidikan harus beradaptasi dengan kebijakan publik yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kebijakan pendidikan di Indonesia telah diubah, seperti penghapusan Ujian Nasional dan pergantian sistem masuk perguruan tinggi negeri. (Aurilia et al., n.d.) Namun, beberapa kebijakan lain seperti pemberlakuan zonasi dan penggunaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) masih dianggap membebani guru dan tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak hanya itu pada Kebijakan pendidikan Indonesia lebih mengandalkan model analisis kebijakan berdasarkan asumsi politik. Banyak indikator menunjukkan hal ini. Untuk memulai, ada inkonsistensi dalam asumsi yang mendasari tantangan pendidikan. (n.d.) Keberagaman dan heterogenitas, serta karakter dan konteks yang disebut sekolah, tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Berdasarkan temuan tersebut, banyak ahli menjelaskan bahwa hasil kebijakan Indonesia didasarkan pada asumsi politik, sementara beberapa praktisi menyatakan mereka menggunakan lebih banyak model analisis kebijakan berdasarkan asumsi politik. Namun, tidak semua kebijakan pendidikan dibuat dengan cara ini; banyak dibuat dalam menanggapi analisis dan kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang muncul, termasuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi dan merumuskan beberapa alternatif solusi untuk masalah yang diangkat selama perumusan model analisis kebijakan pendidikan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diberikan bermanfaat bagi semua orang. pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, selain bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Yuliah Pengawas Sekolah di Kementerian Agama et al., n.d.) Karena kebijakan pendidikan bersifat kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam guna mengembangkan pendidikan yang komprehensif dan integratif.

Pendidikan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh politik karena kebijakan dan pengaturan sistem pendidikan dibuat oleh penguasa dan proses pengambilan

keputusan untuk membuat satu kebijakan memerlukan banyak upaya politik untuk mencapainya. Politik uang atau tidak akan berdampak pada generasi muda yang menghabiskan banyak waktu di sekolah dan mewujudkan impiannya di masa depan. Politik dan pendidikan sebenarnya selalu berkaitan satu sama lain misalnya seorang kepala sekolah kejuruan yang memutuskan kebijakan pola magang bagi siswanya apakah keputusan tersebut merupakan keputusan politik atau tidak masih dalam pembahasan. Politik adalah landasan untuk membuat kebijakan dalam aspek lain seperti ekonomi, sosial, hukum, budaya, keamanan dan pertahanan sehingga tidak akan ada bedanya dengan aspek pendidikan karena proses pengambilan keputusan pemerintah pusat sebabnya sistem kami Pendidikan masih terkait dengan seberapa buruk dan baik kebijakan menuju pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga negara di Indonesia. (Dan et al., 2020) Di Indonesia pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk memberantas masalah pendidikan, pemerintah melakukan upaya dalam kebijakan terhadap pendidikan misalnya implementasi budaya bangsa dan pendidikan karakter, peningkatan profesional guru, pembaruan kurikulum dan implementasi. Politik dapat menjadi alat untuk mengakses sistem pendidikan yang lebih baik karena semua kebijakan yang dibutuhkan pendidikan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, seperti guru tidak akan memaksa siswa untuk mencapai nilai setinggi mungkin dalam mata pelajaran yang tidak mereka sukai karena akan merusak kepercayaan diri mereka di masa depan. (Aurilia et al., n.d.)

Menetapkan arah merupakan tujuan dari implementasi kebijakan, yang bertujuan agar tindakan pemerintah mencapai tujuan kebijakan. Ketika tujuan dan target awal yang luas telah diperjelas, program telah dibuat, dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan dan target tersebut, proses penetapan kebijakan baru ini dapat dimula

### KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa analisis kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan efektif, objektif, dan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam kebijakan pendidikan Indonesia, terutama karena pengaruh politik, kurangnya perencanaan yang matang, serta kebijakan yang sering berubah dan tidak konsisten. Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan untuk menilai berbagai penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali dibuat tanpa analisis mendalam sehingga implementasinya kurang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya analisis kebijakan yang ilmiah, komprehensif, dan berorientasi pada solusi agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Pendidikan, D., Budidaya Binjai, S., Gaharu No, J., Utara, B., Makmur, J., Binjai, K., & Utara, S. (n.d.). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK. In *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* (Vol. 9, Issue 1).
- Anesti, O. :, & Wardani, R. (n.d.). Moh Rifki 3) , 1D]KLII1DIL ¶¶¶LQXOORK 4) , Indo Ahya Maulana 5) , 1XU ¶¶\$LQLL=DKUR 6). In *Universitas Ahmad Dahlan* (Vol. 1).
- Aurilia, D., Putra, Z. H., Hermita, N., & Corpiady, J. (n.d.). *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri Strategi Pengumpulan Data Kualitatif Dalam Penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR)*.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>

- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Rozak, A., Tinggi, S., & Islam Az-Ziyadah, A. (n.d.). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA*. 3(2), 2021.
- Shelvia Permata Sari, Rida Ramadhani Ritonga, & Budi Askhori Sirait. (2023). Penerapan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(5), 181–193. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i5.146>
- Yuliah Pengawas Sekolah di Kementrian Agama, E., Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, D., & Barat, J. (n.d.). *The Implementation of Educational Policies*.